

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti saat ini, teknologi informasi menjadi hal yang tidak asing lagi bagi sebagian besar orang. Teknologi informasi telah mampu memasuki banyak lapisan bidang ilmu pengetahuan dan membawa banyak perubahan baik dalam organisasi swasta maupun pemerintah, bahkan sampai organisasi usaha masyarakat. Teknologi informasi seakan sudah menjadi kebutuhan utama setiap orang dalam berbagai aspek kehidupannya. Teknologi informasi sendiri terus mengalami pembaharuan dan kemajuan, contoh yang dapat diambil yaitu adanya Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau *Decision Support System* (DSS) yang berguna untuk membantu pengambilan keputusan agar keputusan yang dihasilkan nantinya lebih efektif.

Sistem pendukung keputusan bisa diaplikasikan dengan menggunakan berbagai metode tergantung kebutuhan penggunaannya, sistem ini bukan alat utama dalam proses pengambilan keputusan namun sistem ini berperan sebagai pembantu penggunaannya dalam pengambilan keputusan. Pengguna sistem pendukung keputusan biasanya adalah manajer atau pimpinan organisasi. Karena sistem pendukung keputusan adalah bagian dari perkembangan teknologi informasi, maka cara kerja sistem pendukung keputusan adalah pengolahan informasi yang diberikan penggunaannya, supaya nantinya menghasilkan *output* berupa keputusan yang efektif dan akurat.

Dalam penelitian kali ini, metode yang akan diterapkan dalam sistem pendukung keputusan adalah metode *analytical hierarchy process* (AHP) atau prosedur hirarki analitis. Metode AHP adalah salah satu metode yang dapat membantu proses pengambilan keputusan, karena metode ini menerapkan beberapa

kriteria (*multi criteria*). Kriteria yang dimasukkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya. Bahkan dalam metode AHP ini bisa memilih mana kriteria yang akan dijadikan prioritas dalam mendukung proses pengambilan keputusan.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Bank Indonesia, 1998). Mengacu kepada Undang-undang tersebut, jenis Bank di Indonesia ada dua yaitu : Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, atau yang biasa kita ketahui dengan BPR.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Bank Indonesia, 1998). Bank Perkreditan Rakyat memang disediakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana untuk keperluan usaha. Bank Perkreditan Rakyat sendiri melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau sejenisnya. Bank Perkreditan Rakyat menempatkan dananya dalam bentuk Serifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan. SBI sendiri adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada Bank Perkreditan Rakyat apabila Bank Perkreditan Rakyat mengalami kelebihan likuiditas (P. R. Indonesia, 1992). Dalam memberikan pinjaman dana atau yang biasa kita ketahui dengan istilah kredit, maka Bank Perkreditan Rakyat harus mempunyai keyakinan yang cukup atas kemampuan dan kesanggupan para debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Dalam memberikan kredit, Bank Perkreditan Rakyat juga dibatasi oleh ketentuan Bank Indonesia yaitu adanya batas maksimum pemberian kredit.

Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur atau BPR WM merupakan bank yang menyediakan peminjaman dana untuk masyarakat. Dalam menjalankan kepentingan dan perannya sebagai Bank Perkreditan Rakyat, BPR WM juga harus memiliki keyakinan yang cukup terhadap para calon debitur atas kemampuan dan kesanggupan mereka untuk melunasi utang. Maka dari itu BPR WM melakukan pertimbangan dan analisa atas beberapa aspek penilaian kelayakan pemberian kredit. Biasanya pertimbangan ini melibatkan beberapa kriteria yang menjadi perhatian, yaitu Character (kepribadian), Capital (uang muka), Capacity (kemampuan), Collateral (jaminan), Condition (kondisi) (Oktaputra, Alif Wahyu ; Noersasongko, 2014). Karena setiap calon debitur memiliki kondisi ekonomi dan karakter yang berbeda-beda maka BPR WM harus jeli dan berhati-hati dalam memberikan persetujuan kredit. Kriteria yang ditetapkan adalah untuk menghindari terjadinya kredit macet dari para calon debitur yang berdampak kerugian bagi BPR WM.

Pertimbangan dan analisa yang dilakukan tentunya membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran. Butuh waktu yang lama untuk menganalisa setiap calon debitur yang jumlahnya banyak, proses analisa dan pertimbangan kebanyakan dilakukan secara manual, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya *human error* saat memberikan keputusan akhir persetujuan kredit. Kesalahan ini bisa terjadi di tahap proses analisa seperti kesalahan pengolahan data calon debitur, data pinjaman dana, dan sebagainya sehingga nantinya akan berpengaruh ke keputusan akhir. Tidak hanya kesalahan manusia yang dilakukan secara tidak sengaja, namun ada beberapa kesalahan yang dilakukan secara sengaja dan hal ini biasa dikenal dengan *fraud*. Dampak yang disebabkan *human error* tidak sebesar dampak yang disebabkan oleh *fraud*. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya *human error* dan *fraud* maka perlu dibuat sebuah sistem pendukung keputusan berbasis komputer yang dapat membantu pengendalian mutu dan pencegahan *fraud* di BPR WM dalam mengambil keputusan persetujuan peminjaman dana kepada calon debitur supaya akurat, efektif dan efisien sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Alasan penelitian dilakukan di BPR WM karena sebagai Bank Perkreditan Rakyat, BPR WM akan menganalisa setiap calon debitur menggunakan *judgement* atau penilaian dari 9 kriteria utama yang menjadi kebijakan dalam BPR WM yaitu Kejujuran, Keterlambatan, Kepatuhan Pajak, Pekerjaan, Kelayakan Usaha, Prospek Usaha, Rasio Cicilan terhadap Penghasilan, Rasio Aset terhadap Jumlah Pinjaman dan Rasio Jaminan terhadap Jumlah Pinjaman dalam penentuan calon debitur yang layak menerima kredit. Tidak semata-mata kriteria utama saja yang digunakan, BPR WM juga memasukkan beberapa kriteria tambahan untuk mendukung proses analisa kredit. Dengan kriteria utama dan kriteria tambahan yang beragam tentunya metode *Analytical Hierarchy Procedur* (AHP) menjadi sangat cocok diterapkan di BPR WM ini karena dalam Buku *Decision Making The Analytic Hierarchy Process* yang ditulis oleh Saaty, menjelaskan bahwa metode AHP memang kerap kali diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan *judgement* atau penilaian dari seorang *expert* sebagai input utamanya. Dalam BPR WM, yang dianggap sebagai seorang ekspert adalah tim analis kredit.

Metode *Analytical Hierarchy Procedur* (AHP) ini akan masuk sebagai model pengambilan keputusan dalam Sistem Pendukung Keputusan yang akan dibuat, dalam sistem juga akan dirancang *user* atau pengguna yang berkepentingan dan bertanggungjawab sesuai dengan bagian pekerjaan mereka. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini semua informasi atau data calon debitur serta proses analisa kreditnya akan tercatat dan tersimpan dengan rapi dalam sebuah database, dengan penyimpanan dalam database yang terstruktur akan sangat memudahkan pihak BPR WM untuk mengelola data nasabah dan data analisa kreditnya.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan untuk menerapkan metode *Analytical Hierarchy Procedur* (AHP) dalam membantu keputusan persetujuan peminjaman dana kepada calon debitur. Ada beberapa alasan penulis menerapkan metode AHP, salah satunya karena algoritma atau proses perhitungan AHP lebih mudah dipahami dan perhitungan pembobotan pada kriteria – kriteria yang ditetapkan tidak terlalu rumit (Pangestu, 2018). Sementara untuk desain basis data

menggunakan *mySQL* yang sangat populer digunakan untuk basis data web, kemudian menggunakan bahasa pemrograman yaitu PHP (*PHP Hypertext Preprocessor*) sementara untuk desain interface, proses input dan output dan pengembangan sistem akan menggunakan strategi *Rapid Applications Development (RAD)*.

1.2. Perumusan dan Batasan masalah

Bagaimana Sistem Pendukung Keputusan dengan metode AHP sebagai model pengambilan keputusan dapat membantu proses analisa kelayakan pemberian kredit di Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur ?

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan

1. Membantu proses pengambilan keputusan kelayakan pemberian kredit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPR WM.
2. Meminimalisir terjadinya human error.
3. Meminimalisir analisa kredit yang subyektif.
4. Menghindari terjadinya fraud.
5. Mengoptimalkan standarisasi dan pengendalian mutu di BPR WM.

1.3.2. Manfaat

1. Pengambilan keputusan oleh pihak BPR WM menjadi lebih mudah dan analisa penilaian kredit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
2. Standarisasi dan pengendalian mutu di BPR WM menjadi lebih baik.
3. Menghemat waktu dan tenaga, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi akurat, efektif dan efisien.

4. Penyimpanan data calon nasabah dan penilaian kredit lebih rapi dan terstruktur

